



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIDOREJO
2017-2022

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO
Jl. Ki PENJAWI NO. 19 SALATIGA 50714

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat yang akhirnya dapat menjamin pemanfaatan semakin terbatas menjadi lebih efektif dan efisien. Mekanisme perencanaan pembangunan sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan berubahnya paradigma pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan, proses perencanaan pembangunan yang selama ini bersifat tertutup, eksklusif dan elitis serta mengabaikan partisipasi masyarakat berubah menjadi proses perencanaan dengan pendekatan partisipatif dan pendekatan *bottom-up*. Proses dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholder*) untuk mendapatkan aspirasi dan menimbulkan rasa memiliki.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Otonomi Daerah ditempatkan secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi, dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kecamatan Sidorejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Salatiga wajib menyusun materi Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sidorejo Tahun 2017-2022 sebagai bagian dari gambaran visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Sidorejo ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Sidorejo pada tahun-tahun sebelumnya, dan sebagai antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sidorejo digunakan sebagai pedoman dan landasan operasional penyusunan, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025);
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
28. **Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun -**
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sidorejo Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidorejo adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sidorejo untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sidorejo.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sidorejo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Salatiga.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sidorejo untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Memudahkan seluruh aparat Kecamatan Sidorejo untuk memahami dan menilai arah seluruh kegiatan.
- e. Tersedianya dokumen Perencanaan Kegiatan sebagai salah satu acuan resmi yang melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sidorejo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIDOREJO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Sidorejo merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Selain tugas pokok Kecamatan juga menyelenggarakan tugas, yang meliputi :

- 1) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) melaksanakan koordinasi pelayanan publik;
- 3) melaksanakan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- 4) melaksanakan administrasi Kecamatan;
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokoknya antara lain :

- 1) merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan Kecamatan melalui usulan Sekretariat, Seksi dan Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Kecamatan melalui usulan Sekretariat, Seksi dan Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat, Seksi dan Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

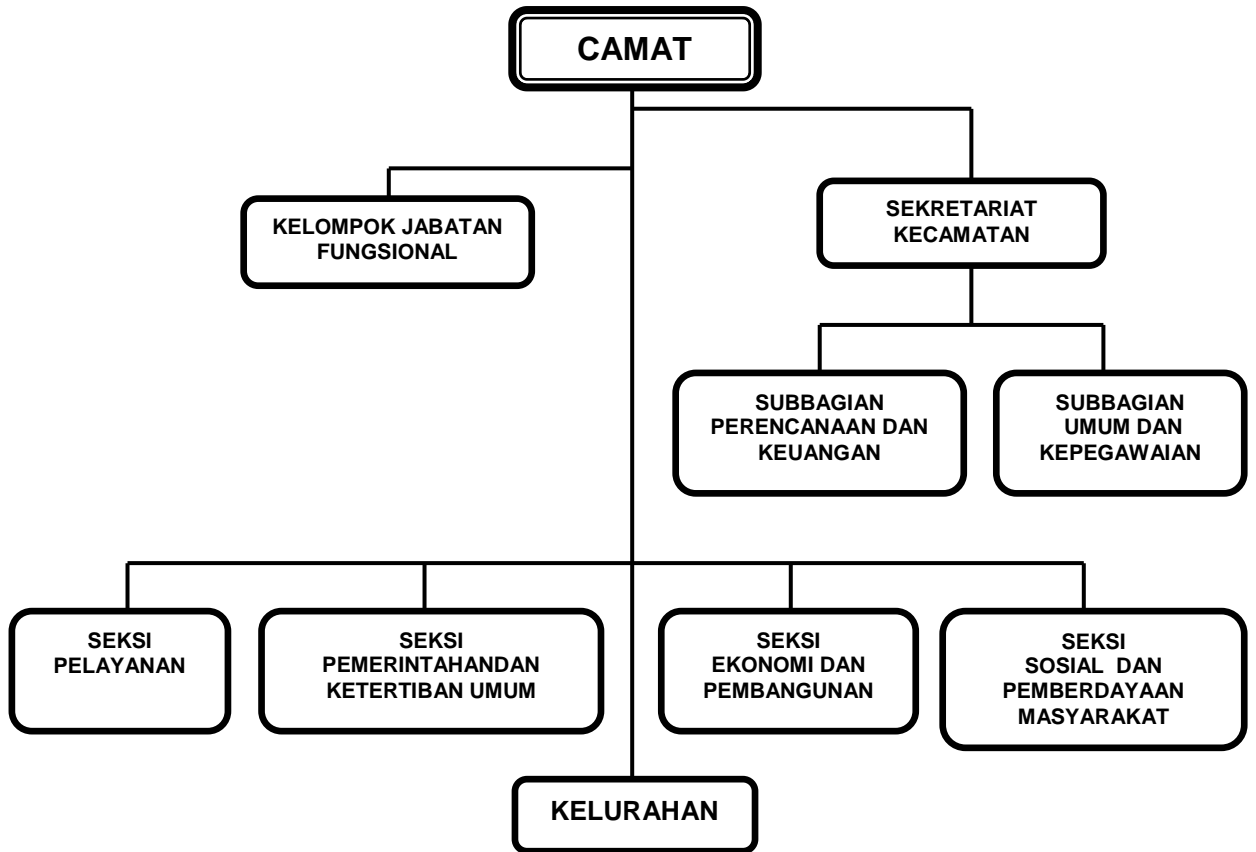
- 4) merumuskan program dan kegiatan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Kecamatan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Kecamatan melalui usulan Sekretariat, Seksi dan Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
- 8) menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan;
- 9) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- 10) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan;
- 11) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan;
- 12) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan publik;
- 13) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan;
- 14) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- 15) melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;

- 16) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- 17) menyelenggarakan kerja sama daerah sesuai dengan lingkup tugas Kecamatanberpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- 18) memberikan rekomendasi perizinan sesuai dengan lingkup tugas Kecamatanmelalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;
- 19) menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan publik;
- 20) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 21) menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- 22) melaksanakan administrasi Kecamatan melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 23) melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- 24) melaporkan pelaksanaan program Kecamatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 25) mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 26) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan;
- 27) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;

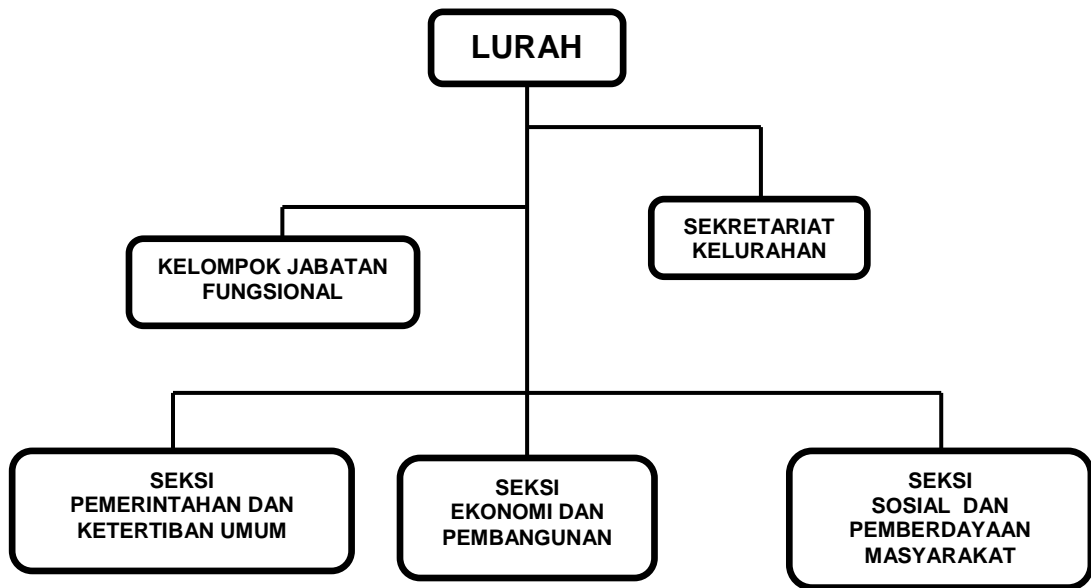
- 28) melaksanakan tugas dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- 29) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Kecamatan.
 - c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan serta administrasi keuangan Kecamatan.
 - d. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kesekretariatan dan kepegawaian Kecamatan.
 - e. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.
 - g. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.
 - h. Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur organisasi Kecamatan Sidorejo berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga No. 51 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.Struktur Organisasi Kecamatan



2. Struktur Organisasi Kelurahan



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi-Seksi yaitu : Seksi Pelayanan, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pemerintah Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi-Seksi yaitu : Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sidorejo

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebanyak 66 orang terdiri dari pegawai sekretariat kecamatan dan pegawai 6 kelurahan se Kecamatan Sidorejo. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menurut golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut :(perOktober 2017)

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2016**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1				1
2	SMP Sederajat	1				1
3	SMA Sederajat	9	7			16
4	D3	6	7			13
5	S1	12	19			31
6	S2	4				4
JUMLAH		33	33			66

Pada data yang tersaji di tabel tersebut terlihat jumlah komposisi tingkat pendidikan tertinggi PNS di kecamatan sidorejo berada di tingkat S1 (sarjana) sedangkan untuk tingkat pendidikan tertinggi adalah pada tingkat S2 dengan rasio jumlah antara laki dan perempuan sebesar 1:1. Jumlah PNS di Kecamatan Sidorejo ini dinilai kurang karena kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk nya yaitu 55.543 jiwa. Sedangkan di kecamatan Sidorejo tidak terdapat tenaga non PNS.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Golongan II	9	12	21
2	Golongan III	23	21	44
3	Golongan IV	1		1

Jumlah pegawai di OPD Sidorejo golongan III sejumlah 44 orang dengan rasio laki-laki dan perempuan 1:1, adapun golongan II sejumlah 21 orang dengan rasio laki-laki dan perempuan yang sama.

2.3. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana mempunyai nilai penting dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada OPD terkait, karena hal ini yang akan menunjang terselenggaranya setiap program dan kegiatan yang ada.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah	253	-	253
2	Peralatan dan Mesin	3.652	-	3.652
3	Gedung dan Bangunan	31	-	31
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	-	4
5	Aset Tetap Lainnya	289	-	289
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Aset Lainnya	1	102	103
Jumlah		4.230	102	4.332

Dari tabel diatas terlihat sarana dan prasarana yang ada di OPD Sidorejo baik dalam kondisi yang baik maupun rusak.

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Salatiga Tahun 2012-2016**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Usulan dalam Musrenbang		t.a.d	200	240	250	260	t.a.d	233	341	50	104	t.a.d	116.5	142.1	20	40
2	Jumlah Linmas yang terlatih		t.a.d	301	301	301	301	t.a.d	279	252	180	180	t.a.d	92.69	83.72	59.8	59.8
3	Jumlah PKK yang aktif dalam melaksanakan Program Kerja		t.a.d	6	6	6	6	t.a.d	5	5	5	5	t.a.d	83.33	83.33	83.33	83.33
4	Jumlah PKK yang dibina		t.a.d	6	6	6	6	t.a.d	5	5	5	6	t.a.d	83.33	83.33	83.33	100
5	Jumlah LPMK yang dibina		t.a.d	6	6	6	6	t.a.d	6	6	6	6	t.a.d	100	100	100	100
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan		t.a.d	100	100	100	100	t.a.d	95	80	82	85	t.a.d	95	80	82	85

Setelah penyajian **tabel 2.4**, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Salatiga**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	256.880.000	301.695.000	324.454.000	423.142.000	588.930.000	233.464.783	282.377.452	318.632.572	403.476.700	493.528.343	91	94	98	95	84
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.610.000	234.747.000	280.400.000	276.481.000	554.267.000	75.610.000	225.145.270	272.915.400	255.334.592	520.906.266	100	96	97	92	94
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	24.510.000	23.402.000	29.104.000	20.000.000	18.750.000	24.510.000	22.142.000	27.952.000	15.840.000	17.280.000	100	95	96	79	92
4	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	9.325.000	12.166.000	12.526.000	-	-	9.320.000	12.165.900	10.880.600			100	100	87
5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	50.000.000	72.641.000	61.608.000	756.416.000	741.088.000	50.000.000	72.634.400	61.152.030	754.649.925	739.909.700	100	100	99	100	100
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	72.079.000	61.608.000	111.541.000	145.017.000	-	72.078.300	61.152.030	109.439.900	143.026.500		100	99	98	99
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	45.000.000	9.893.000	10.000.000	14.964.000	14.881.000	44.999.960	9.892.460	9.716.200	14.215.700	11.169.200	100	100	97	95	75
8	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	-	-	-	20.000.000	36.729.000	-	-	-	19.579.900	33.971.550				98	92

Setelah penyajian Tabel 2.5, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Sidorejo, peluang dan tantangan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Peluang

.....

2. Tantangan

.....

Kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Sidorejo, ada beberapa indikator kinerja yang sangat dominan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidorejo sehari-hari, berikut kami sampaikan beberapa indikator antara lain :

- a. Pelayanan permohonan pengajuan KTP/KK mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini tergantung dari tingkat kebutuhan masyarakat akan fungsi dan kegunaan KK dan KTP.
- b. Jumlah usulan pembangunan dari masyarakat melalui musrenbang mengalami penurunan hal ini dikarenakan usulan masyarakat yang diakomodir pemerintah hanya sebagian kecil, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan musrenbang menurun.
- c. Untuk penerimaan PBB di Kecamatan Sidorejo tiap tahunnya mengalami kenaikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Buat analisis swot ambil tantangan dan peluang tantangan

Peluang: Pelayanan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait

Kecamatan Sidorejo merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah Kota Salatiga yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam sebagian urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, pertanahan maupun kebutuhan surat menyurat yang lain merupakan pelayanan rutin yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sidorejo.

Dalam bidang perekonomian dan pembangunan di wilayah Kecamatan Sidorejo berupaya dengan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi dan lingkungan hidup melalui penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Strategi yang digunakan dalam rangka penyusunan konsep perencanaan pembangunan yang merupakan sumber aspirasi dan kebutuhan masyarakat dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai

bahan dasar usulan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah di Kota Salatiga.

Dalam penyelenggaraan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah Kecamatan Sidorejo secara optimal berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, menjamin kesehatan masyarakat serta berusaha memberikan kedamaian dalam menjalankan ibadah bagi masing-masing umat beragama.

Selanjutnya dalam bidang keamanan dan ketertiban pemerintah Kecamatan Sidorejo berusaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah kelurahan dan kecamatan, bekerja sama dengan instansi terkait dengan pola Kemitraan polisi masyarakat (Polmas).

Adapun ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sidorejo, antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat di Kecamatan Sidorejo masih perlu ditingkatkan dalam kepemilikan administrasi kependudukan seperti : KTP, KK, maupun dalam mengurus surat-surat catatan sipil seperti : Akte kelahiran dll.
- b. Kesadaran masyarakat di Kecamatan Sidorejo masih perlu ditingkatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan, terutama dalam hal membuang sampah dan membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing.
- c. Partisipasi warga masyarakat menurun dalam menetapkan usulan rencana pembangunan (Musrenbang) yang ada di wilayah Kecamatan Sidorejo karena usulan masyarakat hanya sebagian kecil saja yang diakomodir.
- d. Banyaknya lembaga yang dalam masyarakat yang berdampak pada kinerja lembaga-lembaga di kelurahan dan kecamatan belum optimal (LPMK, BKM, KTI, HKTI, SPM dll).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki tingkat pelayanan masyarakat Kecamatan Sidorejo, Antara lain :

- a. Upaya Aparatur pemerintah Kecamatan Sidorejo dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat pada setiap pertemuan baik di tingkat mulai RT/RW, PKK, Posyandu, organisasi lembaga kemasyarakatan maupun pertemuan tingkat kelurahan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Meningkatkan kualitas aparatur sumber daya manusia kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas.
- c. Dengan melakukan koordinasi-koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat mengakses usulan pembangunan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sidorejo.

- d. Penguatan kelembagaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan untuk dapat saling koordinasi dan melakukan hubungan yang baik antara aparatur pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan serta lembaga lintas sektoral untuk bersama-sama memberikan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan pembangunan;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga ada beberapa permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh Kecamatan Sidorejo dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

- Kurangnya ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan ABK
- Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki standar kompetensi jabatan
- Masih kurang memadainya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja kantor
- Belum adanya integrasi data :perijinan, PBB, absensi pegawai.
- Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang.

2. Seksi Pelayanan

- Belum adanya SDM yang secara teknis untuk pelayanan PATEN
- Belum optimalnya pemenuhan aplikasi untuk PATEN, yang tersedia saat ini hanya IUMK
- Belum konsistennya SOP untuk pelaksanaan pelayanan paten (perijinan dan non perijinan), sering berubah-ubah.
- Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
- Belum optimalnya penyebaran informasi persyaratan pelayanan kepada masyarakat, terutama ditingkat kelurahan.
- Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Belum adanya SDM teknis yang secara khusus untuk pelayanan PBB
- Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar PBB
- Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis

- Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan kelurahan
- Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan kelurahan
- Kurangnya kesejahteraan petugas linmas
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung trantibum di lingkungan
- Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Belum adanya SDM yang secara teknis menguasai Perencanaan Pembangunan
- Belum memadainya sarpras penunjang kerja pembangunan
- Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian SPJ dana hibah
- Kurangnya ajang promosi potensi produk unggulan di kecamatan

5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Belum optimalnya fungsi dan pelayanan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
- Kurang maksimalnya pembinaan terhadap lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat
- Masih kurangnya personil di seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program dalam RPJPD ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJPD tersebut. Hasil identifikasi OPD tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJPD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isustrategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Sidorejo agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi RPJPD.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi	Masih kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik		
	Tujuan	Belum optimalnya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan		
	Sasaran	Masih kurangnya penyebarluasan informasi yang diselenggarakan di kecamatan		
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB		
		Masih kurangnya pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi dengan OPD terkait		
		Menurunnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas dari tahun ketahun		
		Belum optimalnya fungsi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
		Belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat		

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Kecamatan sebagai perangkat daerah pelayanan di kota tidak memiliki keterkaitan secara organisatoris dengan perangkat daerah ditingkat Provinsi maupun dengan Kementerian/Lembaga di tingkat nasional.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak memiliki program maupun kegiatan yang berdampak pada perubahan tataruang dan kondisi lingkungan hidup di saat ini

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Sidorejo diatas sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu :

1. Belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat
2. Masih kurangnya penyebaran informasi layanan yang diselenggarakan di kecamatan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan Paten di Kecamatan
4. Masih kurangnya pelaksanaan fungsi koordinasi dengan OPD /stakeholder terkait
5. Masih kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2
7. Menurunnya minat masyarakat menjadi anggota linmas dari tahun ke tahun
8. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kebersihan lingkungan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan Kecamatan Sidorejo selama Tahun 2017-2022.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi organisasi dan memiliki keterkaitan dengan visi organisasi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidak mutlak harus terukur dan kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Camat serta profil pelayanan yang terkait dengan kinerja.

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran sbb :

1. Meningkatnya peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya penyebaran informasi layanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN
4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur di kecamatan
5. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2
7. Meningkatnya ketersediaan linmas sesuai kebutuhan masyarakat
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sidorejo beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	meningkatnya peran peran kelompok pemberdayaan masyarakat	persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina	%	60	62	64	66	68	70	72
		meningkatnya penyebaran informasi yang disampaikan ke masyarakat	cakupan wilayah yang mendapatkan sosialisasi pelayanan	%	65	67	71	73	75	78	80
		meningkatnya kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan paten	persentase perijinan paten yang diterbitkan	%	85	85	90	90	95	95	100
		meningkatnya kapasitas SDM aparatur di kecamatan	persentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	50	54	58	62	66	70	75
		meningkatnya ketersediaan sarpras dalam menunjang kinerja aparatur	persentase sarpras dalam kondisi baik	%	70	72	75	77	80	82	85

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
		meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2	tingkat ketepatan waktu WP dalam membayar PBB-P2	%	66,81	70	71	72	73	74	75
		meningkatnya pemenuhan ketersediaan linmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat	persentase linmas yang aktif di kecamatan sidorejo	%	90	91	92	93	94	95	96
		meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	% realisasi hasil musrenbang	%	82	83	84	85	86	87	88
		meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan	% RW dalam kebersihan lingkungan	%	52	54	56	58	60	62	64

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikator keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

5.1. Strategi

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dilaksanakan atau *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Untuk mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Sidorejo ditetapkan strategi pencapaian sbb:

1. Meningkatkan peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, fasilitas kegiatan, pemberian bantuan dan stimulan.
2. meningkatkan penyebaran informasi layanan kepada masyarakat melalui sosialisasi, pembuatan data potensi dan profil, pembuatan leaflet
3. meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN melalui sosialisasi, penetapan SOP, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM
4. meningkatkan kapasitas SDM aparatur di kecamatan melalui, pendidikan dan pelatihan, pembinaan aparatur, pemberian *reward* dan *punishment*
5. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur melalui pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana

6. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 melalui Penyampaian SPPT PBB, sosialisasi PBB, pekan pelayanan keliling PBB, pendataan SPOP, undian Hadiah PBB, lomba pencapaian target PBB
7. meningkatkan ketersediaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat melalui pembinaan, pemberian insentif dan pemberian fasilitas
8. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang, sosialisasi, pendampingan kelompok penerima bantuan
9. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui sosialisasi, lomba kebersihan, pelatihan pengelolaan persampahan.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1. peningkatan peran kelompok pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pendampingan dan pemberian bop untuk meningkatkan motivasi kinerja kelompok pemberdayaan masyarakat
2. peningkatan penyebaran informasi layanan kepada masyarakat difokuskan pada sosialisasi PATEN
3. peningkatan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN diprioritaskan pada pengendalian pelaksanaan SOP pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur di kecamatan difokuskan dengan pembinaan aparatur, pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
5. peningkatan ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur difokuskan pada pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana
6. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 diprioritaskan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2
7. peningkatan ketersediaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat difokuskan pada pembinaan anggotanya.
8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan musrenbang, sosialisasi, pendampingan kelompok penerima bantuan
9. peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan diprioritaskan dengan sosialisasi dan lomba kebersihan

Rumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Sidorejo disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sidorejo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, fasilitas kegiatan, pemberian stimulan	peningkatan peran kelompok pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pendampingan dan pemberian bop untuk meningkatkan motivasi kerja kelompok pemberdayaan masyarakat
	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang, sosialisasi, pendampingan kelompok penerima bantuan	peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan musrenbang, sosialisasi, pendampingan kelompok penerima bantuan
	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui sosialisasi, lomba kebersihan, pelatihan pengelolaan sampah	peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan diprioritaskan dengan sosialisasi dan lomba kebersihan
	meningkatnya kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN	meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN melalui sosialisasi, penetapan SOP, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM	peningkatan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN diprioritaskan pada pengendalian pelaksanaan SOP pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat	meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, pembuatan data potensi dan profil, pembuatan leaflet	peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat difokuskan pada sosialisasi PATEN
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 melalui Penyampaian SPPT PBB, sosialisasi PBB, pekan pelayanan keliling PBB, pendataan SPOP, undian Hadiah PBB, lomba pencapaian target PBB	peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2 diprioritaskan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2
	meningkatkan kapasitas SDM aparatur di kecamatan	meningkatkan kapasitas SDM aparatur di kecamatan melalui, pendidikan dan pelatihan, pembinaan aparatur, pemberian reward dan punishment	Peningkatan kapasitas SDM aparatur di kecamatan difokuskan dengan pembinaan aparatur, pemberian reward dan punishment
	meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur	meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur melalui pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana	peningkatan ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur difokuskan pada pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana
	meningkatkan ketersediaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat	meningkatkan ketersediaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat melalui pembinaan, pemberian insentif dan pemberian fasilitas	peningkatan ketersediaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat difokuskan pada pembinaan anggaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program perangkat daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Sidorejo. Rencana program dan kegiatan dalam rangka menjawab tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Sidorejo tahun 2017-2022 adalah sbb :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan Peralatan gedung kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
 - j. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 5. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah**
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
- 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**
 - a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
 - c. Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
 - d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**
 - a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah**

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
- 9. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu**
 - a. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perijinan
- 10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**
 - a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa**

Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	lokal
					Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)		
4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.05	- 5.50	.020 -10				539		565		591		603		627		652		3.576	Kecamatan Sidorejo	
5.05	- 5.50	.020 -1.1	lencana		1300	6	1320	6.5	1340	7	1360	7.5	1380	8.	1400	8.5	1420	44		
5.05	- 5.50	.020 -1.2	lokasi		7	47	7	52	7	57	7	62	7	67	7	72	7	357		

				sumber daya air dan listrik	dan telepon																						
5.05	-	5.5	.020	-	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional/perpanjangan STNK	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 37 motor	unit			39	10	39	12	39	14	39	16	39	18	39	20	39	90				
5.05	-	5.5	.020	-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan Kantor dan penjaga malam	orang			16	176	16	181	16	186	16	191	16	196	16	201	16	1.131				
5.05	-	5.5	.020	-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis			77	84	77	85	77	86	77	87	77	88	77	90	77	520				
5.05	-	5.5	.020	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis			17	45	17	50	17	55	17	57	17	60	17	62	17	329				
5.05	-	5.5	.020	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan komponen listrik	jenis			20	20	20	22	21	24	21	26	22	28	22	30	22	150				

5.0 5	-	5.5	.020 0	- 1.1 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis		26	9	26	10	26	10. 5	26	11	26	11. 5	26	12	26	63		
5.0 5	-	5.5	.020 0	- 1.1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan	jenis	1	1	8.7	1	9.2	1	9.7	1	10. 2	1	10. 7	1	11. 2	1	60		
5.0 5	-	5.5	.020 0	- 1.1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	jenis	2	2	53.5	2	57	2	60	2	53	2	56	2	61	2	338		
						Tersedianya makan minum kegiatan																0		
5.0 5	-	5.5	.020 0	- 1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksanan ya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	80	12	81	12	82	12	83	12	84	12	85	12	495		
5.0 5	-	5.5	.020 0	-2	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana nya peningkata n sarana parasarana aparatur				58.85		15 7.2 91		86 6.6 11		30 5.8 69		21 5.8 43		18 3.4 21		1.78 7.88 3		

5.05	-	5.50	.020	-	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	paket		2	64.5	3	70	3	75	3	80	3	85	2	80	16	454.5		
5.05	-	5.50	.020	-	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	jenis		-	-	7	50	7.0	50.0	7.0	50.0	7.0	50.0	10	75	38	275		
5.05	-	5.50	.020	-	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	jenis		1	3	5	65	7	150	5	120	3	80	5	150	26	568		
5.05	-	5.50	.020	-	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	jenis		-	-	8	24	7	50	4	30	3	35	4	20	26	159		
5.05	-	5.50	.020	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kegiatan	7	7	200	7	200	7	200	7	200	7	200	7	200	42	1.200		
5.05	-	5.50	.020	-	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala	jenis	3	3	62.5	3	65	3	67.5	3	70	3	72.5	3	75	18	412		

				Dinas/Operasional	a Kendaraan Dinas/Operasional																		
5.05	-	5.5020	-	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis	3	9	11	9	11	9	12	9	12	9	13	9	13	54	72		
5.05	-	5.5020	-	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jenis	3	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	18	150		
5.05	-	5.5020	-	Pemeliharaan rutin/Berkala Taman	Terlaksananya pemeliharaan taman di kecamatan dan kelurahan	lokasi	7	7	30	7	31	7	31	7	32	7	32	7	33	42	189		
5.05	-	5.5020	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/	kegiatan	1	4	236.5	7.0	250.0	7.0	250.0	7.0	250.0	7.0	250.0	7.0	250.0	39	1.487		

5.05	-	5.50200	-	6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan	Dokumen	24	24	12.5	24	12.5	24	12.5	24	12.5	24	12.5	9	75		
5.05	-	5.50200	-	21	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah				150		170		190		210		230		250		1.200
5.05	-	5.50200	-	21.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	kec		1	150	1	170	1	190	1	210	1	230	1	250	1	1.200
5.05	-	5.50200	-	22	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				944		1.149		1.694		1.895		2.106		2.317		10.105

					t																		
5.05	-	5.5	.0200	-	22.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan (insentif RT-RW, PKK, LPMK)	kec dan kel	7	7	685	7	873	7	1.070	7	1.270	7	1.470	7	1.670	7	7.038
5.05	-	5.5	.0200	-	22.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Tersusunnya buku profil/potensi 1 kecamatan dan 6 kelurahan	kec dan kel	1	7	124	8	129	8	134	8	139	8	144	8	149	8	819
5.05	-	5.5	.0200	-	22.5	Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan tim lelang lelang garapan eks tanah bengkok	kel	6	6	47	7	47	7	48	7	48	7	48	7	48	7	286

5.0 5	-	5.5	.020 0	- 22. 6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	Kegia tan	1	3	88	3	10 0	3	12 0	3	90	3	90	3	90	8	482		
5.0 5	-	5.5	.020 0	-23	Program Peningkata n Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Desa	Terlaksana nya Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Desa				72		82		16 1		17 4		17 7		18 0		846		
5.0 5	-	5.5	.020 0	- 23. 1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangun an desa	Rapat lintas sektor, sosialisasi dan lomba kebersihan, pelatihan hansip linmas	kec dan kel	7	7	72	7	82	7	92	7	10 2	7	10 2	7	10 2	8	552		
5.0 5	-	5.5	.020 0	- 23. 6	Pelaksanaan Musyawara h Pembangun an Desa	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	kegiat an	7	7	63.5	7	66	7	69	7	72. 0	7	75. 0	7	78	7	424		

5.0 5	-	5.5	.020 0	-24	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah an Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah an Daerah				15		15		15		15		15		15		90
5.0 5	-	5.5	.020 0	-24. 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Sosialisasi bagi staf kecamatan dan kelurahan, cetak buku adm kependudukan		2	80	15	80	15	80	15	80	15	80	15	80	15	80	90
5.0 5	-	5.5	.020 0	-31	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terlaksananya pelayanan perijinan terpadu				66		69		72		75		78		81		441

5.0 5	-	5.5	.020 0	- 31. 1	Pembinaan penyeleng araan pelayanan perijinan	Nilai survei kepuasan masyarakat (angka)	jenis	6	7	66	7	69	7	72	7	75	7	78	7	81	7	441		
5.0 5	-	5.5	.020 0	-35	Program Pengelolaa n Kekayaan Budaya	Terlaksana nya Pengelolaa n kekayaan Budaya						0		0		0		0		0		0		
5.0 5	-	5.5	.020 0	- 35. 1	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksanan ya Pentas seni dalam rangka menyambut tahun baru	lokasi		6	40												40		
TOTAL										60.66 8		15 9.3 75		86 9.3 71		30 8.8 80		21 9.1 17		18 6.9 59		1.80 4.37 0		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan	78	82	83	84	85	86	86
2.	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	80	82	83	85	87	88	88
4.	Terciptanya lingkungan bersih dan sehat	83	83	84	84	85	85	85
5.	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	50	53	55	56	58	60	60
6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka)	84	85	87	89	90	92	92

Salatiga, 2017
CAMAT SIDOREJO

Drs. NOEGROHO AGOES SETIJONO
Pembina Tk.I
NIP. 19670802 199703 1 002

BAB VII

P E N U T U P

A. Pedoman Transisi

Pedoman Transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sidorejo Tahun 2016 yang harus disusun pada Tahun 2016 mempunyai dasar acuan. Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2016 tetap dilanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena setiap Kecamatan Sidorejo dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2016 tetap mengacu kepada program-program Kota Salatiga yang telah ditetapkan dalam dokumen.

B. Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA Kecamatan Sidorejo Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Salatiga selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga yang disesuaikan dengan RPJM Provinsi Jawa Tengah serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Sidorejo ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sidorejo berkewajiban menyusun RENSTRA Tahun 2017-2022 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
2. RENSTRA Kecamatan Sidorejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Sidorejo sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKJiP Kecamatan Sidorejo .
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Sidorejo adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja SKPD yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga sebagai acuan Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022 Kecamatan Sidorejo
5. RENSTRA Kecamatan Sidorejo adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Sidorejo.

6. RENSTRA Kecamatan Sidorejo Tahun 2017-2022 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Namun secara umum RENSTRA Kecamatan Sidorejo tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT SIDOREJO

Drs. NOEGROHO AGOES SETIJONO

Pembina Tk.I

NIP. 19670802 199703 1 002

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Ren pa	
			Tahun ke-1	Tahun ke-2
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaya

No	Program	Anggaran pada Tahun		
		2012	2013	2014
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	256.880.000	301.695.000	324.454.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.610.000	234.747.000	280.400.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	24.510.000	23.402.000	29.104.000
4	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	9.325.000
5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	50.000.000	72.641.000	61.608.000
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	72.079.000	61.608.000
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	45.000.000	9.893.000	10.000.000
8	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	-	-	-

ren/Kota Tahun-..... (Renstra Periode yang Lalu)

Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-			Realisasi Capaian pada Tahun ke-			
Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4

inan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun-..... (Renstra Perio

Jn ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
423.142.000	588.930.000	233.464.783	282.377.452	318.632.572	403.476.700	493.528.343
276.481.000	554.267.000	75.610.000	225.145.270	272.915.400	255.334.592	520.906.266
20.000.000	18.750.000	24.510.000	22.142.000	27.952.000	15.840.000	17.280.000
12.166.000	12.526.000	-	-	9.320.000	12.165.900	10.880.600
756.416.000	741.088.000	50.000.000	72.634.400	61.152.030	754.649.925	739.909.700
111.541.000	145.017.000	-	72.078.300	61.152.030	109.439.900	143.026.500
14.964.000	14.881.000	44.999.960	9.892.460	9.716.200	14.215.700	11.169.200
20.000.000	36.729.000	-	-	-	19.579.900	33.971.550

Keterangan: Menjadi bahan Narasi di Bab II Sub bab 2.3

Rasio Capaian pada Tahun ke-					
Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!
	###	###	###	###	#DIV/0!

ode yang Lalu)

Keterangan: Menjadi bahan Narasi di Bab II Sub bab 2.3

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
2012	2013	2014	2015	2016
91	94	98	95	84
100	96	97	92	94
100	95	96	79	92
		100	100	87
100	100	99	100	100
	100	99	98	99
100	100	97	95	75
			98	92

MATRIK KERJA SINTESA KEWENANGAN, PER

Bidang/Sub Urusan	Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

MASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sesuai Perwali Tusi	Undang-Undang Teknis sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
<p>Sekretariat Kecamatan tugas : menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Kecamatan.</p>	
<p>Sekretariat Kecamatan fungsi:</p>	
<p>a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan;</p>	
<p>b. pengoordinasian perencanaan kegiatan Seksi dan Kelurahan;</p>	
<p>c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan;</p>	
<p>d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Seksi dan Kelurahan;</p>	
<p>e. penyelenggaraan administrasi Kecamatan;</p>	
<p>Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan</p>	

<p>Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di lingkup ekonomi dan pembangunan.</p>	
<p>Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di lingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.</p>	

Fokus pada kolom ini

EN/KOTA

Sintesa Kewenangan	Indikator Kinerja yang Terkait

(Menjadi Narasi di Bab III Sub Bab 3.1)

Rumus Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Perangkat Daerah
	Kurangya ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan ABK
	Kurangya jumlah aparatur yang memiliki standar kompetensi jabatan
	Masih kurang memadainya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja kantor
	Belum adanya integrasi data : perijinan, PBB, absensi pegawai.
	Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang
	belum optimalnya penyediaan data sektoral
	Belum adanya SDM yang secara teknis untuk pelayanan PATEN
	Belum optimalnya pemenuhan aplikasi untuk PATEN, yang tersedia saat ini hanya IUMK

	Belum konsistennya SOP untuk pelaksanaan pelayanan paten (perijinan dan non perijinan), sering berubah-ubah.
	Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
	Belum optimalnya penyebaran informasi persyaratan pelayanan kepada masyarakat, terutama ditingkat kelurahan.
	Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan
	Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pelayanan
	Belum adanya SDM teknis yang secara khusus untuk pelayanan PBB
	Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar PBB
	Kurangnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis
	Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan kelurahan
	Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan kelurahan
	Kurangnya kesejahteraan petugas linmas

	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung trantibum di lingkungan
	Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan
	Belum adanya SDM yang secara teknis menguasai Perencanaan Pembangunan
	Belum memadainya sarpras penunjang kerja pembangunan
	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian SPJ dana hibah
	Kurangnya ajang promosi potensi produk unggulan di kecamatan
	Belum optimalnya fungsi dan pelyanan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
	Kurang maksimalnya pembinaan terhadap lembaga sos-permas
	Masih kurangnya personil di seksi sos-permas.
	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyakat dalam pengelolaan lingkungan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan

Fokus pada kolom ini

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.7
Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

(Diambil dari sheet 2 (Kewenangan-masalah))

No	Permasalahan	Kriteria 1		Krite
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)
1	masih kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	0	0	3
2	Belum optimal nya penyelenggaraan pelayanan Paten di Kecamatan	0	0	4
3	Masih kurangnya penyebarluasan informasi layanan yang diselenggarakan di kecamatan	0	0	4
4	masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB	0	0	0
5	masih kurangnya pelaksanaan fungsi koordinasi dengan opd terkait	0	0	3
6	menurunnya minat masyarakat menjadi anggota linmas dari tahun ke tahun	0	0	2
7	belum optimal nya fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat	0	0	3
8	belum optimal nya fungsi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	0	0	4

Kisi-Kisi Isu Strategis

1	masih kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada
2	Belum optimal nya penyelenggaraan pelayanan Paten di Kecamatan
3	Masih kurangnya penyebaran informasi layanan yang diselenggarakan di kecamatan
4	masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
5	masih kurangnya pelaksanaan fungsi koordinasi dengan opd terkait
6	belum adanya BPBD kota Salatiga
7	menurunnya minat masyarakat menjadi anggota linmas dari tahun ke tahun
8	belum optimal nya fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan

Kriteria 2	Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
x bobot 20	Skor (1- 5)	x bobot 15	Skor (1- 5)	x bobot 15	Skor (1- 5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
60	0	0	3	45	0	0	105	V
80	3	45	3	45	0	0	170	III
80	3	45	4	60	0	0	185	II
0	3	45	3	45	0	0	90	VII
60	3	45	3	45	0	0	150	IV
40	1	15	1	15	0	0	70	VIII
60	3	45	4	60	5	150	315	I
80	4	60	5	75	6	180	395	

la masyarakat
atan
masayarakat

MATRIK KERJA TUJUAN, SASARAN, INDIK

		Menjadi
	Diambil dari hasil Scoring pada sheet 3 (Teknik Scoring)	Akan Menjadi bahan di Sheet 4 (Bab 5)
	Isu Strategis	Tujuan
1	belum optimal nya fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat	meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2	Masih kurangnya penyebarluasan informasi layanan yang diselenggarakan di kecamatan	
3	Belum optimal nya penyelenggaraan pelayanan Paten di Kecamatan	
4	masih kurangnya pelaksanaan fungsi koordinasi dengan opd terkait	
5	masih kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	

6	masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2
7	menurunnya minat masyarakat menjadi anggota linmas dari tahun ke tahun
8	menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kebersihan lingkungan

KATOR SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Menjadi Tat		
Tabel 4.2 di Bab IV Sub Bab 4.2		
	Akan Menjadi bahan di Sheet 4 (Bab 5)	Akan Menjadi bahan di Sheet 4 (Bab 5)
	1 tujuan, Sasaran boleh lebih dari 1	
Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Survey Kepuasan Masyarakat	meningkatnya peran peran kelompok pemberdayaan masyarakat	persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina
	meningkatnya penyebarluasan informasi yang disampaikan ke masyarakat	cakupan wilayah yang mendapatkan sosialisasi pelayanan
	meningkatnya kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan paten	persentase perijinan paten yang diterbitkan
	meningkatnya kapasitas SDM aparatur di kecamatan	persentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas

	meningkatnya ketersediaan sarpras dalam menunjang kinerja aparatur	persentase sarpras dalam kondisi baik
	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2	tingkat ketepatan waktu WP dalam membayar PBB-P2
	meningkatnya pemenuhan ketersediaan linmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat	persentase linmas yang aktif di kecamatan sidorejo
	meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	% realisasi hasil musrenbang
	meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan	% RW dalam kebersihan lingkungan

Del 4.1 Bab IV Sub Bab 4.1

Cara Hitung	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sa		
		Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
jumlah lembaga yang mendapat bantuan / jumlah lembaga yang ada di kecamatan x 100%	%				
jumlah wilayah yg mndapat sosialisasi / jumlah wilayah yg ada X 100	%				
jmlh perijinan paten yang diterbitkan / jmlh perijinan yang di daftarkan X 100	%				
SDM aparatur kec yg mendapatkan peningkatan kapasitas / jumlah SDM kec x 100	%				

jumlah sarpras dlm kondisi baik / jumlah sarpras x 100	%				
jumlah WP yg membayar sd 30 sept / jumlah WP di kecamatan x 100 %	%				
jumlah linmas yg aktif / jumlah linmas total kec sidorejo	%				
jumlah usulan prioritas yang di realisasi / jumlah usulan prioritas X 100	%				
jumlah RW yang berprestasi / jumlah RW X 100	%				

Menjadi Tabel 4.2 di Bab IV Sub Bab 4.2

Asas		Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan
Tahun ke- 4	Tahun ke- 5			
			meningkatkan peran kelompok pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pemberian BOP	Peningkatan peran kelompok pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pendampingan dan pemberian BOP untuk meningkatkan motivasi kerja
			meningkatkan penyebarluasan informasi ke masyarakat melalui sosialisasi, leaflet, pembuatan profil.	peningkatan penyebarluasan informasi difokuskan pada sosialisasi Paten
			meningkatkan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan paten melalui sosialisasi dan survey, penetapan dan pengendalian SOP melalui peningkatan SDM,	pengendalian pelaksanaan SOP pelayanan dan pengadaan sarana dan prasarana
			meningkatkan kualitas SDM aparatur di kecamatan melalui diklat, pembinaan aparatur, pemberian reward dan punishment	meningkatkan kualitas SDM aparatur di kecamatan difokuskan pada pembinaan aparatur, pemberian reward dan punishment

			meningkatkan ketersediaan sarpras dalam menunjang kinerja aparatur melalui pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana	peningkatan ketersediaan sarpras dalam menunjang kinerja aparatur difokuskan melalui pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana
			meningkatkan partisipasi masy dalam membayar PBB-P2 melalui sosialisasi, penyampaian SPPT PBB-P2, pekan pelayanan keliling, pendataan SPOP, undian hadiah PBB-P2	peningkatan partisipasi masy. Dalam pembayaran PBB-p2 diprioritaskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi
			meningkatkan ketersediaan linmas sesuai dengan kebutuhan melalui pembinaan, pemberian insentif dan pemberian fasilitas	peningkatan ketersediaan linmas di prioritaskan pada pembinaan anggota linmas
			meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang melalui sosialisasi, pendampingan kelompok penerima bantuan,	peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di prioritas pada sosialisasi, pendampingan kelompok penerima bantuan,
			meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui sosialisasi, lomba kebersihan, pelatihan pengelolaan sampah	peningkatan partisipasi masyarakat diprioritaskan pada sosialisasi dan lomba kebersihan.

Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Ke

Diambil dari Sheet 4 (Bab IV Plus)	Diambil dari Sheet 4 (Bab IV Plus)
Tujuan	Sasaran
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	meningkatnya peran peran kelompok pemberdayaan masyarakat
	meningkatnya penyebarluasan informasi yang disampaikan ke masyarakat
	meningkatnya kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan paten
	meningkatnya kapasitas SDM aparatur di kecamatan
	meningkatnya ketersediaan sarpras dalam menunjang kinerja aparatur

kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Diambil dari Sheet 4 (Bab IV Plus)	Nama Program Diambil dari Sheet 4 (Bab IV Plus)	Tiap Program dan kegiatan harus ada indikator Program	
Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan
persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		%
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		
cakupan wilayah yang mendapatkan sosialisasi pelayanan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		%
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		
persentase perijinan paten yang diterbitkan	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu		%
	Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan		
persentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Peningkatan Disiplin Aparatur		%
persentase sarpras dalam kondisi baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
	Pengadaan peralatan gedung kantor		
	Pengadaan meubelair		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		
	Pemeliharaan rutin/berkala taman		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		
tingkat ketepatan waktu WP dalam membayar PBB-P2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		%
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		
persentase linmas yang aktif di kecamatan sidorejo	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		%
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		
% realisasi hasil musrenbang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		%
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		
% RW dalam kebersihan lingkungan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		%
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa		

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

34

01

Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan da

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Ca	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina	%			
2	Cakupan wilayah yang mendapatkan sosialisasi pelayanan	%			
3	Perijinan paten yang diterbitkan	%			
4	SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%			
5	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%			
6	Ketepatan waktu WP dalam membayar PBB-P2	%			
7	Linmas yang aktif di kecamatan sidorejo	%			
8	Realisasi hasil musrenbang	%			
9	RW dalam kebersihan lingkungan	%			

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
								Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	meningkatnya kapasitas SDM aparatur di kecamatan	presentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5.05 - 5.5 .0200 -1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			539		565		591		
			5.05 - 5.5 .0200 -1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000	lembar	1300	6	1320	6.5	1340	7	1360	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan air, listrik dan telepon	lokasi	7	47	7	52	7	57	7	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ perpanjangan STNK	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 37 motor	unit	39	10	39	12	39	14	39	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan Kantor dan penjaga malam	orang	16	176	16	181	16	186	16	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	77	84	77	85	77	86	77	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	17	45	17	50	17	55	17	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan komponen listrik	jenis	20	20	20	22	21	24	21	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	26	9	26	10	26	10.5	26	
			5.05 - 5.5 .0200 -1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	jenis	1	1	8.7	1	9.2	1	9.7	1
			5.05 - 5.5 .0200 -1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	jenis	2	2	53.5	2	57	2	60	2
					Tersedianya makan minum kegiatan									
			5.05 - 5.5 .0200 -1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	80	12	81	12	82	12
	meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur	presentase sarpras dalam kondisi baik	5.05 - 5.5 .0200 -2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur			58.849		157.291		866.611		
			5.05 - 5.5 .0200 -2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	paket	2	64.5	3	70	3	75	3	
			5.05 - 5.5 .0200 -2.7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	jenis	-	-	7	50	7.0	50.0	7.0	
			5.05 - 5.5 .0200 -2.9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	jenis	1	3	5	65	7	150	5	
			5.05 - 5.5 .0200 -2.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	jenis	-	-	8	24	7	50	4	
			5.05 - 5.5 .0200 -2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kegiatan	7	7	200	7	200	7	200	7
			5.05 - 5.5 .0200 -2.24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jenis	3	3	62.5	3	65	3	67.5	3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
								Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			5.05 - 5.5 .0200 -2.26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis	3	9	11	9	11	9	12	9
			5.05 - 5.5 .0200 -2.28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jenis	3	3	25	3	25	3	25	3
			5.05 - 5.5 .0200 -2.29	Pemeliharaan rutin/Berkala Taman	Terlaksananya pemeliharaan taman di kecamatan dan kelurahan	lokasi	7	7	30	7	31	7	31	7
			5.05 - 5.5 .0200 02.42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	kegiatan	1	4	236.5	7.0	250.0	7.0	250.0	7.0
	meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dalam menunjang kinerja aparatur	presentase sarana prasarana dalam kondisi baik	5.05 - 5.5 .0200 -3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur				20		23		25	
			5.05 - 5.5 .0200 -3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 75 PNS dan 16 THL	kegiatan	1	1	20	1	23	1	25	1
	meningkatkan kapasitas SDM aparatur di kecamatan	presentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5.05 - 5.5 .0200 -6	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				12.5		12.5		12.5	
			5.05 - 5.5 .0200 -6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan	Dokumen	24	24	12.5	24	12.5	24	12.5	24
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2	Tingkat Ketepatan waktu wajib pajak membayar PBB P2	5.05 - 5.5 .0200 -21	Program Peningkatan Dan Pengembangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah					#####		#####		#####	#####
					Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%			60		65		70	
					Indikator IKU									
			5.05 - 5.5 .0200 -21.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapatkan SPPT	WP	1		150	1	170	1	190	1
	Meningkatnya peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat	Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan	5.05 - 5.5 .0200 -22	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				685.000.000		873.000.000		1.070.000.000	
	meningkatkan ketersediaan linmas sesuai kebutuhan masyarakat	presentase linmas aktif di kecamatan Sidorejo	5.05 - 5.5 .0200 -22.1		Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan (Insentif RT-RW, PKK, LPMK)	%		60		62		64		66
				Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah RW yang mendapatkan layanan insentif pembangunan	RW								
			5.05 - 5.5 .0200 -22.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Tersusunnya buku profil/potensi 1 kecamatan dan 6 kelurahan	Buku	1	7	124	8	129	8	134	8
			5.05 - 5.5 .0200 -22.5	Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Jumlah kelurahan terfasilitasi kegiatan tim lelang garapan eks tanah bengkok	kel	6	6	47	7	47	7	48	7
			5.05 - 5.5 .0200 -22.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan usulan yang mendapatkan realisasi	Kegiatan	1	3	88	3	100	3	120	3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
								Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	5.05 - 5.5 .0200 -23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					135.000.000		148.000.000		161.000.000	
					Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	100	60		65		70		75
					Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40	50		50		52		54
			5.05 - 5.5 .0200 -23.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Kelompok	7	7	72	7	82	7	92	7
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	5.05 - 5.5 .0200 -23.6	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrenbang	Orang	7	7	63.5	7	66	7	69	7
	meningkatkan kapasitas SDM aparatur di kecamatan	presentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5.05 - 5.5 .0200 -24	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah				15		15		15	
			5.05 - 5.5 .0200 -24.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Sosialisasi bagi staf kecamatan dan kelurahan, cetak buku adm kependudukan		2	80	15	80	15	80	15	80
	meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan layanan PATEN	presentase layanan perijinan PATEN yang diterbitkan	5.05 - 5.5 .0200 -31	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu					66.000.000		69.000.000		72.000.000	
			5.05 - 5.5 .0200 -31.1		Nilai survei kepuasan masyarakat (angka)	%	85	86		87		88		89
				Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perijinan	Banyaknya jenis ijin yang dikeluarkan	Buah	6	7	66	7	69	7	72	7
	Meningkatnya peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan	5.05 - 5.5 .0200 -35	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Pengelolaan kekayaan Budaya						0		0	
			5.05 - 5.5 .0200 -35.1	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Pentas seni dalam rangka menyambut tahun baru	lokasi		6	40					
TOTAL									66.059.436		69.157.906		72.867.254	

Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	lokasi
	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target		
15	16	17	18	19	20	21	22	23
603		627		652		3.576	Kecamatan Sidorejo	
7.5	1380	8.	1400	8.5	1420	44		
62	7	67	7	72	7	357		
16	39	18	39	20	39	90		
191	16	196	16	201	16	1.131		
87	77	88	77	90	77	520		
57	17	60	17	62	17	329		
26	22	28	22	30	22	150		
11	26	11.5	26	12	26	63		
10.2	1	10.7	1	11.2	1	60		
53	2	56	2	61	2	338		
						0		
83	12	84	12	85	12	495		
305.869		215.843		183.421		1.787.883		
80	3	85	2	80	16	454.5		
50.0	7.0	50.0	10	75	38	275		
120	3	80	5	150	26	568		
30	3	35	4	20	26	159		
200	7	200	7	200	42	1.200		
70	3	72.5	3	75	18	412		

Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	lokasi
	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target		
15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	9	13	9	13	54	72		
25	3	25	3	25	18	150		
32	7	32	7	33	42	189		
250.0	7.0	250.0	7.0	250.0	39	1.487		
27		29		31		155		
27	1	29	1	31	1	155		
12.5		12.5		12.5		75		
12.5	24	12.5	24	12.5	9	75		
	#####		#####		#####	1.200.000.000		
75		75		80		80		
210	1	230	1	250	1	1.200		
1.270.000.000		1.470.000.000		1.670.000.000		7.038.000.000		
	68		70		100			
139	8	144	8	149	8	819		
48	7	48	7	48	7	286		
90	3	90	3	90	8	482		

Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	lokasi
	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target		
15 174.000.000	16	17 177.000.000	18	19 180.000.000	20	21 975.000.000	22	23
	80		85		75			
	56		58		45			
102,7		102,7		102,8		552		
72,0,7		75,0,7		78,7		424		
15		15		15		90		
15,80		15,80		15,80		90		
75.000.000		78.000.000		81.000.000		441.000.000		
	90		91		91			
75,7		78,7		81,7		441		
0		0		0		0		
						40		
75.306.526		78.216.526		81.184.131		#REF!		

CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA

Drs. NOEGROHO A. SETIJONO
Pembina Tk. I
NIP. 19670802 199703 1 002